

Dampak COVID-19 Terhadap Industri Pariwisata Indonesia dan Analisis Respons Kebijakan Pemerintah

M. Rifki Fadilah
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII)
Jakarta, 18 Juni 2020

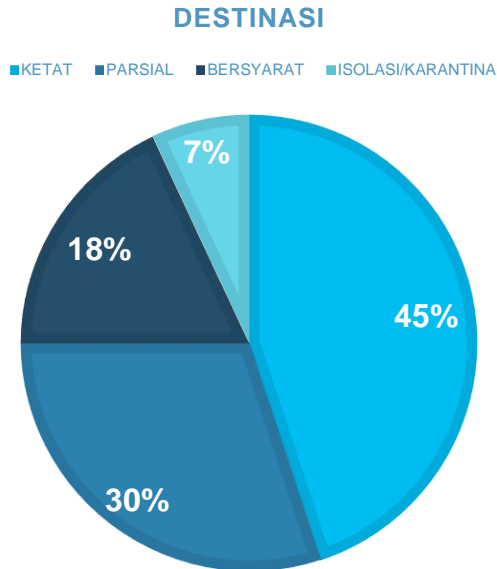
DIPRESENTASIKAN DALAM ACARA TIF SERI 63

Pendahuluan

Situasi Sebelum COVID-19 dan Kondisi Awal COVID-19

- » Tiga dekade terakhir sektor pariwisata terus mengalami ekspansi dan diversifikasi. Diperkirakan **meningkat rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun** dalam periode 2010-2030 (United Nations World Tourism Organization / UNWTO, 2019).





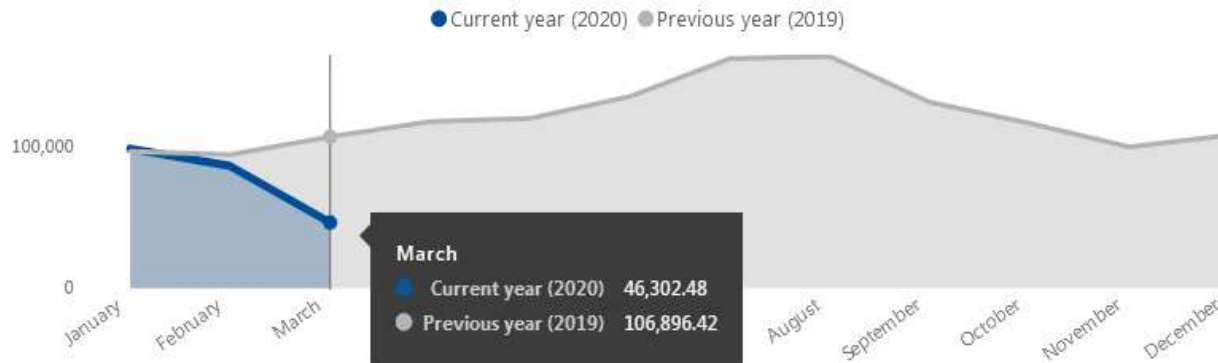
- » 188 negara melapor kasus positif COVID-19.
- » Penerapan kebijakan **pembatasan mobilitas manusia hingga barang** untuk meredam penyebaran pandemik.
- » Kebijakan pembatasan perjalanan pariwisata di beberapa negara sejak 30 Januari 2020, dari total 217 destinasi (Sumber: UNWTO)

PENDAHULUAN: KONDISI AWAL COVID-19

5

Akibat dari kebijakan ini, UNWTO (2020) juga melaporkan bahwa di bulan Maret 2020 terjadi:

- » Kontraksi sektor pariwisata minus 50,68 persen *year on year* (yoy) dari total wisman secara global.
- » Penurunan total wisman (dari US\$107 miliar pada Maret 2019 menjadi US\$46 miliar pada Maret 2020)



Sumber: UNWTO, 2020



DAMPAK COVID-19 TERHADAP PARIWISATA (Secara Global)

6

Amerika Utara diprediksi menurun sebesar 9,4 persen, dari US\$181,8 miliar menjadi US\$164,7 miliar

Eropa diprediksi menurun 16,2 persen, dari US\$212 miliar menjadi US\$177,7.

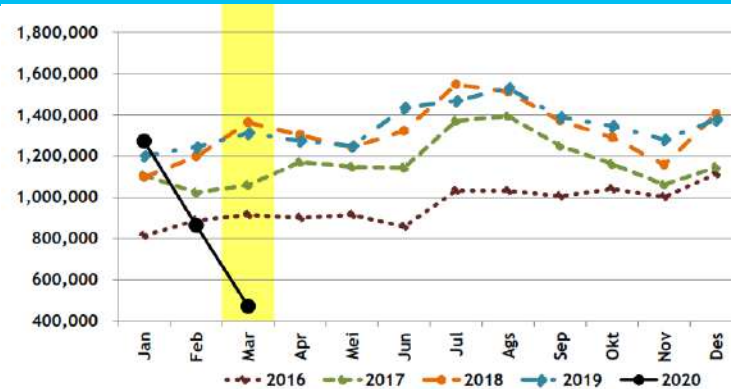
Asia diprediksi menurun 27 persen, dari US\$225,9 miliar menjadi US\$164,7 miliar.

Potensi kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata mencapai US\$80 Miliar pada kuartal-I 2020 (UNWTO, 2020)



DAMPAK COVID-19 TERHADAP PARIWISATA (Situasi di Indonesia)

7



1.311.911 wisman

Maret 2019

470.898 wisman

Maret 2020

- » Penurunan kunjungan wisman ke Indonesia (minus 64,11% yoy) melalui seluruh pintu masuk (Kementerian Pariwisata RI, 2020):



Dampak COVID-19 kepada Industri Penerbangan

Secara Global dan Kasus di Indonesia



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Secara Global)



9

- » Saluran pertama disrupsi sektor pariwisata akibat COVID-19 dirasakan oleh sektor industri transportasi penerbangan, **baik internasional maupun domestik.**
 - » Dampak sektor penerbangan rute internasional:
 - » Pada bulan Februari 2020, **Pemerintah Indonesia resmi menyetop sementara penerbangan dari dan menuju Cina Daratan** (kecuali Macau dan Hong Kong), serta **mencabut sementara kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi seluruh warga negara Cina** (CNBC, 2020).
 - » Lebih lanjut, kebijakan ini juga diambil oleh beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa.



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Secara Global dan Indonesia)



10

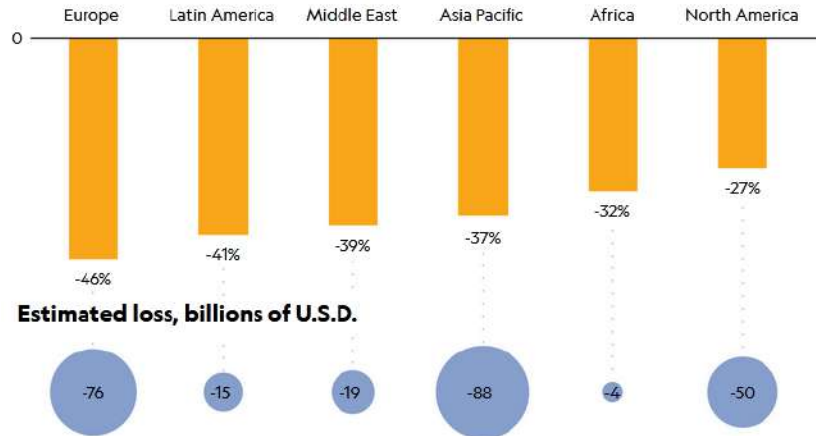
- » Akibat pelarangan mobilitas ke Cina, *The International Air Transport Association (IATA)* memperkirakan **hilangnya pendapatan sebesar US\$29,3 miliar tahun ini**. Secara umum, diperkirakan maskapai penerbangan dapat **menderita kerugian hingga US\$113 miliar** IATA (IATA, 2020).
- » Dalam kasus di Indonesia, saat ini tercatat lima maskapai nasional yang mengoperasikan penerbangan reguler dan *carter* dari atau ke Cina, **yakni Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air, serta Sriwijaya Air**. Rute Indonesia-Cina menyumbang 35 hingga 40 persen terhadap total penerbangan internasional Indonesia.



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Secara Global dan Indonesia)



11



» IATA memperkirakan pendapatan industri transportasi udara global tahun 2020 diperkirakan turun sebesar US\$252 miliar atau merosot sebesar 44 persen dibandingkan tahun 2019 (IATA 2020).

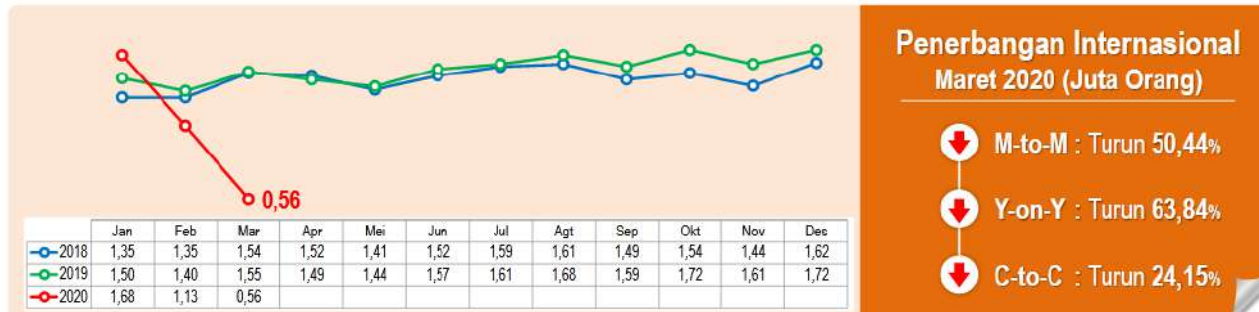
Sumber: IATA, 2020



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Kasus Indonesia)



12



- » Penurunan penumpang pesawat internasional turun sebesar 63,84 persen dibandingkan bulan Maret 2019 (yoy) atau hanya sebanyak 560.000 penumpang (BPS, 2020).
- » *Market* internasional industri penerbangan Indonesia kehilangan pendapatan sekitar US\$748 juta (INACA dalam CNBC, 2020).



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Kasus Indonesia)



13

Penerbangan Domestik Maret 2020 (Juta Orang)

- ↓ M-to-M : Turun 20,84%
- ↓ Y-on-Y : Turun 24,09%
- ↓ C-to-C : Turun 10,12%



- » Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan mudik
- » Penurunan jumlah penumpang wisatawan nusantara (wisnus) 24.09 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 4,58 juta dibanding bulan Maret 2019 sebesar 5,79 juta wisnus (BPS, 2020)



DAMPAK COVID-10 KEPADA INDUSTRI PENERBANGAN (Kasus Indonesia)



14

- » **Penurunan penumpang domestik (44 persen)** dari Januari-April 2020 di empat bandara besar di Indonesia, yakni di Jakarta, Bali, Medan, serta Surabaya (INACA).
 - » Kerugian yang dialami maskapai penerbangan dari empat bandara besar tersebut, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 mencapai sekitar 812 juta dollar AS (INACA dalam Kompas.com, 2020).
- » Secara keseluruhan, dampak dari pembatalan penerbangan maskapai memukul sektor pariwisata yang ditaksir mengalami **kerugian mencapai angka US\$4 miliar atau setara Rp54,6 triliun** (Fadilah, 2020).



Dampak COVID-19 kepada Sektor Akomodasi Perhotelan

Secara Global dan Kasus di Indonesia



DAMPAK COVID-19 KEPADA SEKTOR AKOMODASI PERHOTELAN (Secara Global)



16

Below -70%	Negative 60-70%	Negative 50-60%	Negative 40-50%	Negative 20-40%	Negative 0-20%
Italy -93%	Slovakia -70%	Israel -59%	Myanmar -49%	Portugal -39%	Australia -17%
Lebanon -77%	Slovenia -68%	Estonia -58%	Philippines -49%	Morocco -39%	New Zealand -15%
South Korea -75%	Vietnam -67%	Cambodia -57%	Kenya -46%	Lithuania -39%	Mexico -15%
Greece -75%	Romania -67%	Poland -56%	Sweden -45%	UAE -37%	Brazil -11%
Kuwait -73%	Singapore -66%	France -55%	Malaysia -45%	Ethiopia -33%	Seychelles -6%
China -72%	Bahrain -66%	Hungary -55%	India -44%	Turkey -33%	
Croatia -71%	Saudi Arabia -65%	Switzerland -55%	Oman -43%	Finland -32%	
	Czech Rep. -64%	Serbia -55%	Laos -43%	Canada -28%	
	Japan -64%	Thailand -53%	Tunisia -43%	USA -27%	
	Georgia -61%	Denmark -51%	Sri Lanka -43%	Maldives -26%	
	Austria -60%	Spain -50%	Egypt -43%	Qatar -26%	
	Belgium -60%	Netherlands -50%	Ireland -41%	Russia -25%	
	Bulgaria -60%	Germany -50%	Ukraine -41%	UK -23%	
			Ghana -41%	Latvia -23%	
			Tanzania -40%	Indonesia -23%	
				South Africa -22%	

Sumber: STR, 2020, diolah LPEM UI



DAMPAK COVID-19 KEPADA SEKTOR AKOMODASI PERHOTELAN (Secara Global)



17

- » **Merosotnya tingkat okupasi hotel dibandingkan tahun 2019:**
 - » Cina: merosot hingga di bawah 70 persen
 - » Italia: merosot hingga 93 persen
 - » Amerika Serikat: merosot hingga 27 persen
- » Bulan Maret 2020, 45 persen bisnis hotel dan perhotelan telah menyatakan kerugian pendapatan antara 10.000 hingga 50.000 euro di Jerman (Statista, 2020).
- » Di Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan hingga 50 persen di tahun 2020, atau kehilangan sebesar US\$124 triliun dari US\$270 triliun total pendapatan (AHLA, 2020).
- » India melaporkan mengalami kerugian sebesar US\$1.3 Triliun sampai US\$1.55 Triliun (Hospitalityworld.com, 2020).



DAMPAK COVID-19 KEPADA SEKTOR AKOMODASI PERHOTELAN (Kasus Indonesia)



18



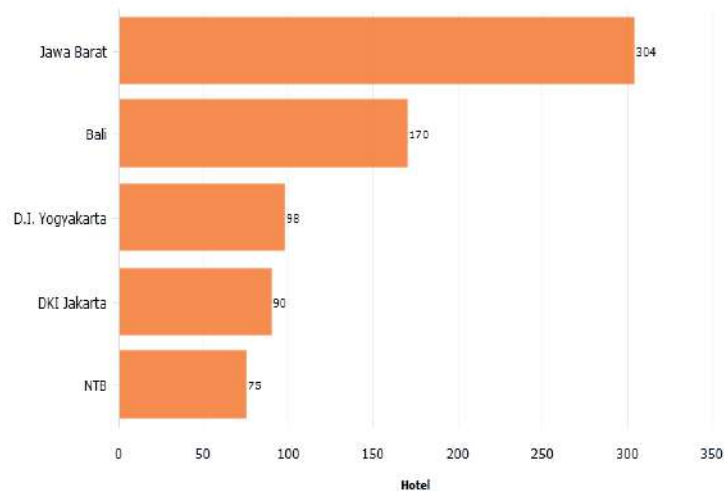
- » Dari kasus di Indonesia, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia sepanjang Maret 2020 mencapai rata-rata 32,24 persen atau turun 16,98 persen (Month to month/mtm) dan turun 20.64 persen jika dibandingkan Maret 2019 (yoy).
 - » Penurunan terparah dialami oleh Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 45,75 persen
 - » Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 43,26 persen, dan
 - » Provinsi Kalimantan Timur sebesar 39,94 persen.



DAMPAK COVID-19 KEPADA SEKTOR AKOMODASI PERHOTELAN (Kasus Indonesia)



19



- » Para pengusaha bidang perhotelan memperkirakan **tingkat pendapatan hotel akan turun pada kisaran 25-50 persen khususnya pada semester-1 2020 ini** (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI dan Horwath HTL, 2020).
- » Setidaknya terdapat **737 hotel di 5 wilayah andalan pariwisata Indonesia yang tutup atau sementara tutup** (Katadata.com, 2020):



DAMPAK COVID-19 KEPADA SEKTOR AKOMODASI PERHOTELAN (Kasus Indonesia)



- » Secara keseluruhan, jumlah **hotel yang telah ditutup di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai lebih dari 1.260 hotel** (PHRI, 2020)
- » Penutupan hotel **berimbas besar kepada sekitar 150.000 karyawan**. Jika dimonetisasi, maka **total kerugian pariwisata dari hotel dan restoran mencapai US\$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp21 triliun (kurs Rp 14.000)** (Kompas.com, 2020).



Dampak COVID-19 kepada Penyedia Akomodasi Makanan & Minuman (Mamin)

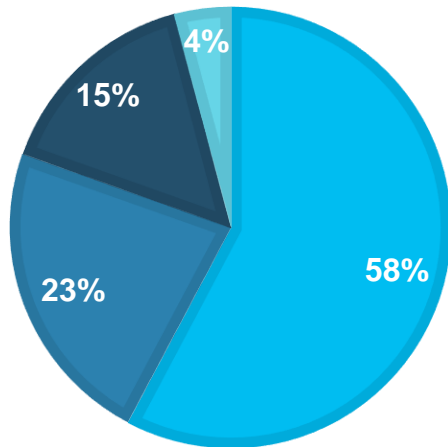


DAMPAK COVID-19 KEPADA INDUSTRI PENYEDIA AKOMODASI DAN MAKANAN-MINUMAN (MAMIN)



INDIKATOR

- PENURUNAN PENJUALAN
- PERMASALAHAN PEMBIAYAAN
- DISTRIBUSI BARANG
- KESULITAN Mencari BAHAN BAKU



- » Pandemi COVID-19 memberi dampak khususnya yang memukul sektor penyedia akomodasi dan mamin secara mendalam, terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- » Menurut KemenkopUKM, sekitar 37.000 UMKM memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius (Lihat grafik).



DAMPAK COVID-19 KEPADA INDUSTRI PENYEDIA AKOMODASI DAN MAKANAN-MINUMAN (MAMIN)



- » **Penurunan** UMKM yang bergerak di usaha penyedia akomodasi dan **mamin mikro mencapai 27 persen**. Sedangkan, dampak terhadap usaha **mamin kecil sebesar 1,77 persen** dan **mamin menengah di angka 0,07 persen** (Temuan dari P2E LIPI, 2020).
- » Selain mamin, diperkirakan juga **omset UMKM di sektor non-kuliner turun hingga 30-35 persen** sejak COVID-19 merebak di Indonesia (Bahtiar, dan Saragih, 2020).
- » UMKM kerajinan dari kayu dan rotan menjadi unit usaha yang juga terdampak dengan **penurunan sebesar 17,03 persen** (Bahtiar, dan Saragih, 2020).



DAMPAK COVID-19 KEPADA INDUSTRI PENYEDIA AKOMODASI DAN MAKANAN-MINUMAN (MAMIN)



24

- » Secara umum dapat disimpulkan:
- » Berdasarkan studi **Fadilah, Kuncoro, dan Sebayang (2018)**, industri pariwisata, khususnya melalui saluran kedatangan wisatawan mancanegara, bersifat *procyclical* terhadap kondisi perekonomian.
- » Artinya, **industri pariwisata sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti siklus ekonomi yang naik-turun**. Hal ini juga menjustifikasi bahwa **pariwisata diperkirakan belum dapat dijadikan sebagai alat untuk penyeimbang perekonomian Indonesia dalam jangka panjang**.



Respons dan Analisis Kebijakan Pemerintah

Langkah-Langkah mitigasi sektor pariwisata yang diminta Presiden Joko dalam rapat terbatas yang digelar pada 16 April 2020 (Setkab, 2020) >>

1

Program perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor pariwisata yang terdampak COVID-19.

2

Realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata.

3

Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

Stimulus Kebijakan Fiskal dan Analisis

1

Rp443,9 miliar untuk alokasi diskon harga tiket, 25 persen dari jumlah tempat duduk pesawat.

2

Rp265,5 miliar untuk diskon avtur di sembilan bandara destinasi wisata selama 3 bulan.

3

Rp298,5 miliar insentif untuk wisatawan mancanegara mencakup perusahaan penerbangan dan agen, promosi, relasi media, dan *influencer*.

4

Rp3,3 triliun mengenakan tarif 0 persen pajak hotel dan restoran 10 destinasi wisata dan subsidi di daerah terdampak selama 6 bulan.

1

Rp443,9 miliar untuk alokasi diskon harga tiket, 25 persen dari jumlah tempat duduk pesawat.

- » Kebijakan nomor 1 yang memberikan stimulus diskon pariwisata kepada wisman seolah menjadi kebijakan yang *counterproductive*, khususnya di tengah situasi pandemik saat ini.
 - » Secara *behavioral* tentu wisatawan mancanegara juga akan memilih untuk tetap tinggal di negaranya masing-masing dan menunda perjalanan wisatanya. Akibatnya, kebijakan ini pun menjadi tidak efektif untuk menarik minat kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

2

Rp265,5 miliar
untuk diskon avtur
di sembilan bandara
destinasi wisata
selama 3 bulan.

- » biaya operasional maskapai penerbangan dapat dibagi menjadi dua; biaya langsung tetap (sewa pesawat, biaya asuransi pesawat, gaji pilot, gaji pramugari, gaji teknisi) dan biaya operasional langsung (avtur, pelumas, tunjangan pilot dan pramugari, pemeliharaan pesawat, PSC, dan komisi agen.)
- » Kebijakan pengurangan jadwal terbang, akan mengurangi besarnya biaya variabel tadi. Dan, insentif berupa pemotongan atau diskon avtur tadi pun menjadi tidak efektif
- » Perlu menjadi catatan adalah biaya langsung tetap (fixed cost) yang mau tidak mau harus dibayarkan oleh perusahaan tanpa terkecuali.
 - » Hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang menyentuh level pembahasan insentif biaya langsung tetap yang harus ditanggung perusahaan.

2

Rp265,5 miliar
untuk diskon avtur
di sembilan bandara
destinasi wisata
selama 3 bulan.

- » Ditambah saat ini banyak perusahaan penerbangan mengalami masalah arus kas (*cashflow*) yang disebabkan tingginya permintaan akan pengembalian dana (*refund*) dari penumpang yang membatalkan penerbangannya.
- » Akibatnya, untuk menambal biaya tersebut, banyak perusahaan mengambil opsi untuk merumahkan kru pesawat, pemotongan gaji hingga PHK (Detik Finance.com, 2020).

3

Rp298,5 miliar insentif untuk wisatawan mancanegara mencakup perusahaan penerbangan dan agen, promosi, relasi media, dan *influencer*.

- » Kebijakan ini menjadi *counterproductive*, khususnya di tengah situasi pandemi saat ini. Hal ini dikarenakan di saat banyak negara-negara sudah mulai menutup pintunya bagi wisatawan asing atau pun untuk kegiatan berwisata, Pemerintah Indonesia justru membuka pintu selebar-lebarnya bahkan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Indonesia.
- » Namun, pada prinsipnya kebijakan ini sudah direvisi dan ditunda pelaksanaannya.

4

Rp3,3 triliun
mengenakan tarif 0
persen pajak hotel
dan restoran 10
destinasi wisata dan
subsidi di daerah
terdampak selama 6
bulan.

- » Bagi Pemda, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu pemasukan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - » Kebijakan ‘menggratiskan’ pajak hotel dan restoran akan berbuntut panjang kepada **berkurangnya PAD daerah**. **Potensi kehilangan PAD dari penerimaan pajak hotel dan restoran diperkirakan sebesar 30 persen**. Terutama, di daerah-daerah yang memiliki kemandirian belanja daerah dari poros kegiatan pariwisata (hotel dan restoran).
- » Sesuai dengan prinsip penarikan pajak hotel dan restoran yang dikenakan kepada konsumen, tentu saja di tengah situasi pandemi ini para wisatawan akan **mengurangi intensinya untuk berpelesiran ke daerah-daerah wisata**. Alhasil, dengan adanya penurunan *demand* terhadap kegiatan berwisata ini juga akan berefek kepada penurunan permintaan kepada sektor akomodasi hotel dan restoran.

4

Rp3,3 triliun
mengenakan tarif 0
persen pajak hotel
dan restoran 10
destinasi wisata dan
subsidi di daerah
terdampak selama 6
bulan.

- » Putaran berikutnya, jika memang tidak ada konsumen/wisatawan yang datang untuk berwisata, tentu besarnya penerimaan dari pajak hotel dan restoran ini juga pasti akan menurun, tanpa alih-alih adanya pembebasan pajak hotel dan restoran.
- » Adanya daerah yang menerapkan pembebasan pajak, juga membuat kemandirian daerah secara politis berkurang. Ditambah Pemerintah Pusat akan menghibahkan dana sebesar Rp3,3 Triliun sebagai kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran tadi. Alhasil, banyak daerah yang akan merasa berpangku tangan dan menjadi dependen terhadap bantuan Pemerintah Pusat alih-alih mensubstitusi potensi penerimaan pajak yang hilang (*Flypaper Effect Phenomenon*)

- » Guncangan terhadap pariwisata, layanan transportasi, dan kegiatan terkait jasa domestik umumnya tidak akan pulih dengan cepat, dan **proyeksi pelambatan pertumbuhan global akan semakin membebani evolusi permintaan bentuk-L**. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang akan terjadi pada **sektor manufaktur**, di mana dampak pandemi kemungkinan berbentuk **U daripada berbentuk V**, seperti yang terjadi pada epidemi serupa dan **supply shock** baru-baru ini (Baldwin dan Beatrice Weder, 2020).

Rekomendasi

Jangka Pendek dan Jangka Panjang

REKOMENDASI (Jangka Pendek)

37

- » Pemerintah Pusat melalui Tim Gugus Penanganan COVID-19 perlu memprioritaskan langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan dan antisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih meluas dengan melindungi kesehatan masyarakatnya. Salah satunya dengan mempersiapkan aturan yang detail dan pengawasan yang ketat di saat era 'New Normal'.
- » Kementerian Keuangan dapat memberikan perluasan insentif fiskal untuk sektor penerbangan, khususnya untuk pengurangan biaya tetap yang selama ini belum tersentuh dalam paket kebijakan stimulus fiskal..
- » Pemerintah Daerah juga dapat memberikan perluasan pemberian insentif perpajakan kepada pelaku sektor pariwisata dalam jangka tertentu. Misalnya melalui kebijakan penghapusan penalti keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menunda kenaikan NJOP, serta mengurangi retribusi daerah yang sifatnya membebankan pihak pengusaha ketika tidak ada permintaan pariwisata.

REKOMENDASI (Jangka Pendek)

38

- » Kementerian Pariwisata dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk terus berkoordinasi dalam mempersiapkan aturan-aturan atau protokol kesehatan di tempat wisata. Perlu adanya **aturan protokol yang detil, tersosialisasi, terawasi, terukur, serta terevaluasi.**
- » Kementerian Pariwisata juga dapat memberikan keleluasaan kepada industri pariwisata untuk **membuat strategi bisnis baru dalam tujuan menjawab adanya perubahan pasar** akibat pandemi COVID-19. Misalkan para pengusaha hotel dapat merubah sementara model bisnisnya, yang biasanya menyediakan penyewaan kamar hotel biasa, menjadi menyediakan pelayanan isolasi mandiri dengan kesterilan tempat yang terjamin dan juga didukung oleh para karyawan hotel, yang telah dilatih dengan prosedur baru dengan penggunaan APD yang sesuai standar.

REKOMENDASI (Jangka Panjang)

39

- » Kementerian Keuangan perlu **mempersiapkan anggaran tambahan khusus untuk mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata**. Hal ini ditujukan untuk mulai menstimulus dan mendorong kembali roda perekonomian dalam industri pariwisata setelah berakhirnya pandemic COVID-19 ini. Anggaran ini dapat dialokasikan dalam berbagai macam bentuk stimulus. Antara lain dalam **bentuk subsidi kepada moda transportasi, hotel, museum dan berbagai tempat tujuan wisata lainnya** agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dari harga normal dan tertarik untuk melakukan kegiatan terkait kepariwisataan, seperti berlibur dengan keluarga, menginap di hotel di akhir pekan, atau berkunjung ke museum dan kegiatan pariwisata lainnya.
- » Kementerian Perhubungan perlu melakukan **perbaikan konektivitas antarmoda transportasi** untuk melengkapi pembangunan infrastruktur fisik, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk harmonisasi informasi dan agenda pariwisata di seluruh daerah, serta sinergi kalender pariwisata yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19

Terima Kasih!

Kontak:

rifki@theindonesianinstitute.com